

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dimaksudkan untuk untuk menyampaikan capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2015 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Tema pembangunan tahunan daerah Jawa Barat tahun 2015, yaitu:

Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2015 memiliki 5 sasaran utama, yaitu : (a) peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat, pelayanan kesehatan bagi semua, kemandirian masyarakat dan pengokohan ketahanan keluarga; **(b) memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional, peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, penguatan UMKM dan daya saing usaha**; (c) modernisasi pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik; (d) peningkatan kualitas infrastruktur strategis Jawa Barat dan mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan melalui pembangunan yang berkelanjutan; (e) mengembangkan seni, budaya, dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal serta memperkuat peran pemuda dan olahraga.

Rencana program dan kegiatan tematik sektoral dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan Jawa Barat dirumuskan kedalam 10 (sepuluh) *Common Goals* sebagai platform sinergi pusat (Kementerian/Lembaga), daerah dan pemangku kepentingan pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan (WP).

Adapun peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan Jawa Barat tematik sektoral terutama terkait dengan **Common**

Goals 4 yaitu **Meningkatnya Ekonomi Pertanian**, dengan sasaran prioritas pembangunan yang terkait bidang industri dan perdagangan adalah pengembangan agribisnis, forestbusiness, marine business dan agro industry. Selain itu, **Common Goals 5** yaitu **Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian** dengan sasaran prioritas terkait yaitu pengembangan industri manufaktur dan pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan muda kreatif.

Mempertimbangkan arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi, maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu terkait dengan misi Kedua Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan dan Misi Ketiga Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Melalui Profesionalisme Tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik adalah :

“Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat yang Berdaya Saing Tinggi”

Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi pertama, Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat. Hal ini untuk menciptakan kemampuan bagi sumber daya industri untuk bersaing di pasar nasional maupun global.
2. Misi kedua, Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri. Hal ini untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan dari Jawa Barat ke luar negeri.
3. Misi ketiga, Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan Perlindungan Konsumen. Hal ini untuk menciptakan keseimbangan sistem perdagangan dalam negeri di Jawa Barat.
4. Misi keempat, Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. Hal ini untuk menciptakan kemampuan dalam mengawal pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan Jawa Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran strategik pembangunan bidang industri dan perdagangan ditetapkan dalam 9 (sasaran) yang meliputi 16 (enam belas) indicator kinerja sebagai alat ukur atas keberhasilan dan kegagalan selama tahun pembangunan 2013 – 2018. Gambaran capaian kinerja sasaran dalam bentuk penilaian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar mendapat predikat “Sedang”.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk, mendapat predikat nilai “Sangat baik”.
3. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten di bidang industri, mendapat predikat nilai “Baik”.
4. Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat, mendapat predikat nilai “Kurang”.
5. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan, mendapat predikat nilai “Baik”.
6. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk, mendapat predikat nilai “Sangat baik”.
7. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja, mendapat predikat nilai “Baik”.
8. Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan, dengan predikat nilai “Sangat Baik”.
9. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, dengan predikat nilai “Sangat Baik”.

Hasil pengukuran keberhasilan dalam capaian setiap sasaran berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

Misi pertama : Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat

1. Sasaran 1 : Meningkatnya perkembangan industri kecil, menengah dan besar, mendapat predikat nilai “Baik” dengan rata-rata capaian sebesar 88.62%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan 1 (satu) indikator diatas target dan 1 (satu) indikator mendekati target.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan standarisasi produk, mendapat predikat nilai “Sangat baik” dengan rata-rata capaian sebesar 3.602%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian kedua indikator tersebut di atas target.
3. Sasaran 3 : Tersedianya tenaga kerja yang kompetern di bidang industri, mendapat predikat nilai “Baik” dengan capaian sebesar 91.4%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja mendekati target.

Misi kedua : Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri

1. Sasaran 1 : Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor Jawa Barat, mendapat predikat nilai “Kurang” dengan rata-rata capaian sebesar 19.8%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian 2 (dua) indikator dibawah target dan 1 (satu) indikator tersebut jauh diatas target.

Misi ketiga : Meningkatkan kelancaran distribusi, pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen

1. Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan dan kemitraan perdagangan, mendapat predikat nilai “Baik” dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian kedua indikator tersebut yang mencapai target.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat serta meningkatnya jaminan kualitas dan kuantitas produk, mendapat predikat nilai “Sangat Baik” dengan rata-rata capaian sebesar 750%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja mencapai target, 1 (satu) indikator mendekati target dan 1 (satu) indikator tersebut jauh diatas target.

Misi keempat : Meningkatkan kinerja sumber daya

1. Sasaran 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana kerja, mendapat predikat nilai “Baik” dengan capaian sebesar 100%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan sesuai target.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan, dengan predikat nilai “Sangat Baik” dengan capaian sebesar 3.00%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan sesuai target.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, dengan predikat nilai “Sangat Baik” dengan capaian sebesar 700%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja jauh diatas target.

Apresiasi yang didapatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2015 adalah Penghargaan Gugus Kendali Mutu (GKM), One Village One Product (OVOP) Kategori Bintang 2, One Village One Product (OVOP) Kategori Bintang 4, Pegawai Teladan Peringkat II Fungsional Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pegawai Tenaga Penera Teladan, UKM Pangan Award 2015 Makanan Siap Saji, UKM Pangan Award untuk Minuman dalam kemasan, UKM Pangan Award untuk Makanan

Ringan / Camilan, Inovasi Pangan Baru, Primaniyarta (KATEGORI EKSPORTIR BERKINERJA) dan Pasar Tertib Ukur.

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rakhmat dan Hidayah-Nya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 secara umum berpedoman pada aspek-aspek pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 910/Kep.1269-Org/2014 tanggal 9 September Tahun 2014 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Dokumen ini mengungkapkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Dinas yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

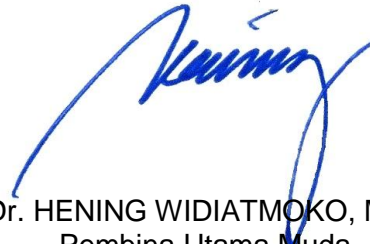
Tujuan penyusunan antara lain untuk, mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan terpercaya. Disisi lain Laporan ini dimaksudkan pula sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelola sumberdaya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan OPD/ Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya lingkup Bidang Ekonomi dan seluruh stakeholder sektor Industri dan Perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Barat atas partisipasi dan kerjasamanya dalam berbagai aktivitas pada tahun 2015.

Meskipun disadari masih terdapat kelemahan dalam penyusunan Laporan ini, namun kami telah berupaya semoga dokumen ini dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa kami harapkan dalam upaya penyempurnaan dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Bandung, Februari 2016

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.
Pembina Utama Muda
NIP 19640831 199203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-1
1.3. Dasar Hukum.....	I-2
1.4. Gambaran Umum	I-5
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi	I-5
1.4.2. Sumber Daya.....	I-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategik 2013 – 2018	II-1
2.1.1 Visi dan Misi.....	II-1
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran.....	II-2
2.1.3 Strategi, Kebijakan dan Program	II-4
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015	II-7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015.....	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	III-1
3.1.1 Kerangka Pengukurann Kinerja	III-1
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja.....	III-2
3.1.3 Pengkuran Indikator Kinerja.....	III-4
3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	III-6
3.1.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang menunjang capaian kinerja.....	III-10
3.1.6 Rencana Program dan Kegiatan	III-12

3.2 Akuntabilitas Anggaran	III-14
3.2.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran.....	III-15

BAB IV	PENUTUP	IV-1
---------------	----------------------	-------------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahun 2015	II-7
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.....	II-8
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2013 - 2018.....	III-2
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015.....	III-4
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015	III-6
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2014..	III-9
Tabel 3.5. Realisasi dan Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2015	III-15
Tabel 3.6. Pelaksanaan Bantuan Keuangan dan Hibah	III-47

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	I-8
Gambar 1.2. Grafik berdasarkan pembagian komposisi berdasarkan eselon	I-9
Gambar 1.3. Grafik komposisi berdasarkan usia	I-9
Gambar 1.4. Grafik komposisi berdasarkan jenis kelamin	I-10
Gambar 1.5. Grafik komposisi berdasarkan pendidikan	I-10
Gambar 1.6. Grafik komposisi berdasarkan golongan	I-11

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015

Realisasi Belanja Subsidi Kegiatan Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat
(KEPOKMAS)